

AKSELERASI PENGEMBANGAN DESA WISATA KARANGTENGAH IMOIRI BANTUL YOGYAKARTA

Agus Djoko Santosa, Rilla Sovitriana, Evi Nilawati
Universitas Persada Indonesia Y.A.I
Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, Jakarta 10340

ABSTRAK

Desa wisata merupakan salah satu desa unggulan yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY, pada sepuluh tahun ke belakang, walaupun penyebutan desa wisata sebenarnya kurang tepat, jika merujuk pada UU tentang desa, sempitnya spasial yang di kondisikan sebagai suatu kawasan yang masyarakatnya lebih dari 85 persen tidak berkecimpung dalam dunia wisata. Akan tetapi Jargon yang berkembang menjadikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyebut kawasan desanya menjadi desa Wisata. Desa wisata Karangtengah di Imogiri Yogyakarta, merupakan satu dari 140 desa wisata yang berkembang di Provinsi DIY, yang memiliki predikat desa wisata sedang tumbuh, artinya adalah desa yang berusaha untuk menjadi suatu desa yang memiliki unggulan komoditas dalam bidang wisata, akan tetapi dengan tidak adanya produk jual dalam bidang wisata, sehingga di upayakan dengan atraksi yang sifatnya temporary. Disamping kelemahan dalam bidang lainnya seperti fisik, social dan ekonpomi, menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya pada tahap awalaan untuk menjadi desa wisata yang berkembang, pendekatan dalam deep interaction denga PRA, menjadi metode yang significant . Untuk selanjutnya kepakaran pendamping menjadi daya ikat yang kuat bagi proses pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Akselerasi, desa wisata

ABSTRACT

Tourism village is one of the superior villages developed by the DIY Provincial Tourism Office. in the past ten years, although the mention of tourism villages is actually less precise, when referring to the Law on villages, the spatial narrowing is conditioned as an area of more than 85 percent not involved in the world of tourism. However, the developing jargon makes it easy for people to call their village area a tourism village. Karangtengah tourism village in Imogiri Yogyakarta, is one of the 140 tourism villages that develop in the Province of DIY, which has a predominantly growing tourist village, meaning that the village is trying to become a village that has superior commodities in the field of tourism, but with no products selling in the field of tourism, so that it is endeavored with temporary attractions. Besides weaknesses in other fields such as physical, social and economic, it becomes a problem that needs to be found a solution at the initial stage to become a developing tourism village, approach in deep interaction with PRA, becomes a significant method. Furthermore, companion expertise becomes a strong binding force for the co

Keywords: Acceleration, tourist village

PENDAHULUAN

Peran serta pembangunan pedesaan pada era otonomi, cenderung bergeser dari paradigma lama, menuju paradigma pembangunan baru, dimana pemerintah secara general lebih berperan sebagai fasilitator. Didalam pelaksanaannya peran fasilitator senantiasa bertumpu pada kebutuhan serta keinginan pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan, baik fisik maupun sumberdaya manusianya. Dengan demikian dapat

dipahami bahwasanya secara hirarki pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan pada unit pemerintahan terendah adalah desa. Pemahaman pentingnya desa sebagai bagian terendah dari pembangunan menjadi suatu pendekatan yang significant dalam memberikan dasar pembangunan secara regional. Hal ini terkait dengan Undang undang No.6 tahun 2014 tentang desa, *Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain*,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia., Sedangkan desa Menurut UU no. 22 tahun 1999 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sehingga untuk mencapai keberhasilan pembangunan pedesaan masa depan, tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah. Pentingnya desa sebagai pusat pertumbuhan merupakan gagasan baru dalam pengembangan wilayah yang berbasis pada kondisi lokal dan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang salah satu metode pendekatannya adalah musyawarah pembangunan desa. Pembangunan pedesaan melalui Musrenbangdes, dijadikan motor dan pilar penggerak untuk membentuk desa sebagai kontributor pembangunan wilayah.

Pengenalan desa wisata di DIY yang dimulai pada tahun 2014, sampai akhir tahun 2015, berjumlah 114 desa wisata, termasuk untuk daerah urban disebut dengan kampung wisata. Penyebutan desa wisata, didasarkan pada kategori adanya obyek wisata, adanya atraksi, adanya wisatawan, adanya komunitas dan adanya akses.

Desa Karangtengah yang terletak di kecamatan Imogiri Yogyakarta termasuk dalam kategori desa wisata tumbuh, merupakan tahapan ke dua dari kategori desa wisata, yang terdiri atas desa wisata embrio, desa wisata tumbuh, dan desa wisata maju (Dinas Pariwisata, 2015). Suatu hal yang menarik untuk kajian lebih mendalam, desa Karangtengah menjadi pusat pertumbuhan, selanjutnya menjadi daya dukung dan daya dorong pembangunan wilayah di kecamatan

Imogiri, secara bagi wilayah kabupaten Bantul. Patut untuk dilihat, dengan memperhatikan kelemahan, selanjutnya menjadi basis untuk mengakselerasi dikembangkan menjadi desa siap tumbuh.

Kelambatan dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat desa Karangtengah, tidak bisa dilepaskan dari akar permasalahan lemahnya kompetensi, keahlian masyarakat, modal kerja masyarakat tani dan perkebunan, skill atau kerampilan masyarakat dalam berusahatani masih bersifat sederhana dan konvensional, demikian pula dalam bidang jasa dan industri. memperhatikan kendala tersebut tentunya akselerasi peningkatan desa menjadi desa tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan, memberikan effect ganda pada kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting.

Memperhatikan kondisi kawasan Karangtengah di kecamatan Imogiri beragam dari wilayah perbukitan sampai dataran utama, maka dalam menyusun program akselerasi desa Karangtengah menjadi pusat pertumbuhan dilaksanakan dengan pendekatan metode PRA. Diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mudah bagi para pelaku dan pelaksana di wilayah desa Karangtengah maupun desa di sekitarnya. Campur tangan pemerintah, akademisi dan pelaku usaha di wilayah Karangtengah sebagai upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting sampai dua tiga tahun mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Masyarakat mampu menjadi akselerator pembangunan desa wisata Karangtengah untuk menjadi pusat pertumbuhan kawasan, dan membentuk masyarakat sebagai tuan rumah pembangunan desa wisata, dengan *multiplier effect* adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Konsepsi Pemikiran.

Terdapat tiga rumusan model yang diberlakukan dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Jack Rothman (1974) dalam Hikmat (2003):

1. Pengembangan lokal

Model ini mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimulai tahap perencanaan, penentuan tujuan, dan implementasi. Strategi dasar yang diterapkan dalam memecahkan permasalahan, adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang menyeluruh dari seluruh warga masyarakat. Tema pokok dalam

pengembangan lokal mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar sukarela, swadaya, dan tujuan utama untuk pendidikan. Metode yang dipergunakan adalah prosedur demokratis dengan musyawarah ataupun diskusi

2. Perencanaan sosial

Model ini berbeda dengan model terdahulu, pada model perencanaan social lebih menekankan pada pemecahan masalah secara teknis, pelaku pakar untuk menyelesaikan permasalahan menjadi kunci utama, peran masyarakat lebih sedikit , akan tetapi untuk kondisi Indonesia perencanaan dengan mengandalkan partisipasi masyarakat penting untuk diperhatikan, karena ada kecenderungan kebijakan program pembangunan masyarakat kurang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Strategi dasar yang dipergunakan untuk memecahkan masalah permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkap fakta atau data mengenai permasalahan, dilanjutkan analisis untuk penyusunan program. Metode yang dipergunakan adalah mengerahkan keahlian atau kepakaran dalam perencanaan, pengumpulan data dan informasi, serta analisis dalam penyusunan program.

3. Aksi sosial

Model ini menekankan pentingnya penanganan kelompok masyarakat yang tidak beruntung secara terorganisasi , terarah , dan sistematis. Model ini bertujuan untuk merubah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah mengadakan usaha-usaha yang lebih terarah, terorganisir untuk mencapai-target , sedang metode yang diterapkan adalah menggerakkan masyarakat untuk tindakan langsung , untuk memecahkan permasalahan

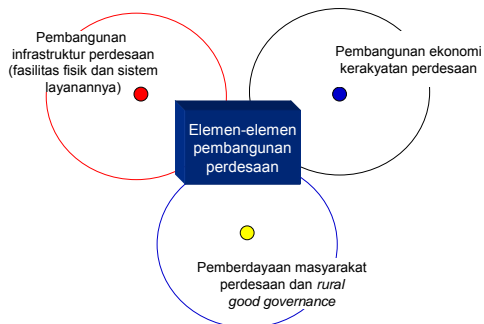
Dari ketiga model yang dimunculkan, menunjukkan bahwasanya model pertama partisipasi dalam pelaksanaan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan penyusunan program sampai ke implementasi cukup besar, sedangkan metode ke dua tidak mesti harus ikut serta, sedangkan model yang ketiga masyarakat sebagai obyek , sehingga keterlibatan dalam penyusunan perencanaan hampir tidak ada. Dalam aplikasi di lapangan khususnya di karangtengah gabungan model pertama dan kedua yang paling baik. Diskripsi model pemberdayaan masyarakat di dalam upaya pembangunan masyarakat desa , disajikan pada tabel 1. sebagai berikut

Tabel 1. Matriks Model Pemberdayaan Masyarakat

Model	Focus	Partisipasi	tema	Metode	strategi
Pemberdayaan lokal	Masyarakat,	Aktif	pembangunan masyarakat pedesaan karangtengah	pendekatan pada kelompok masyarakat dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah	Pengumpulan data ataupun fakta penyusunan program sampai pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan bersama oleh masyarakat
Perencanaan sosial	Masyarakat	Pasif, sampai aktif artinya penekanan utama adalah ketersediaan ahli atau pakar dalam pemecahan masalah	Pembangunan masyarakat pedesaan karangtengah	pendekatan pada kelompok masyarakat dan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tim pakar	Pengumpulan data ataupun fakta sebagai basis data penyusunan program sampai pelaksanaan dan evaluasi mengutamakan adanya pakar
Aksi Sosial	Masyarakat	pasif	Pembangunan masyarakat pedesaan karangtengah	Menggerakkan masyarakat untuk langsung memecahkan masalah peran institusi pemerintah sangat besar	mengadakan usaha-usaha yang lebih terarah, terorganisir untuk mencapai-target

Sumber : Modifikasi dari Jack Rothman, 1974

Konsep pembangunan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat tersebut merupakan ide yang berkembang setelah masa reformasi di Indonesia, dengan berkembangnya demokratisasi setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, walaupun secara konsepsi metode ini sudah baik, tetapi implementasinya masih tetap dipengaruhi secara significant oleh government. gambaran pemberdayaan dalam konteks pembangunan pedesaan di gambarkan sebagai berikut :



Pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dalam aplikasinya bertumpu pada modal dasar yang dimiliki masyarakat, dalam pelaksanaannya lemahnya modal dan teknologi menjadi kendala untuk pengembangan usaha mandiri utamanya dalam mengakselerasi pembangunan desa , dengan demikian disadari sepenuhnya campur tangan pemerintah dalam ketiga variabel menjadi sangat dominan. Dua hal yang penting untuk dimengerti dalam pembangunan desa dan pedesaan saat ini, peran pemerintah sebagai *steering power* dalam pembangunan , dilakukan dengan mendorong terciptanya variabel pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi ini merupakan bentuk gerakan pembangunan internal untuk membentuk *good governance*. Pembangunan desa dan pedesaan dilaksanakan oleh pemerintah secara internal pada masyarakat dan eksternal di luar komunitas masyarakat, dengan ikatan tidak langsung mendukung konsepsi pembangunan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, dan pasar serta pemasaran bagi produk masyarakat.

Dengan banyaknya peran pemerintah melalui sistem *top down* menjadikan masyarakat diharuskan mengikuti arahan dan pemikiran dari pemerintah, dengan demikian terjadi tidak sepenuhnya merupakan *assesment* masyarakat, dari sebab keberadaan masyarakat , masih dalam posisi yang selalu lemah dalam kemampuan, teknologi ataupun modal.

Walaupun secara konsepsional pemberdayaan masyarakat desa yang ada saat ini sudah berjalan, akan tetapi pemerintah lebih bersifat mengarahkan,

mulai dari perencanaan sampai pada implementasi. Dengan memperhatikan tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengarah pada :

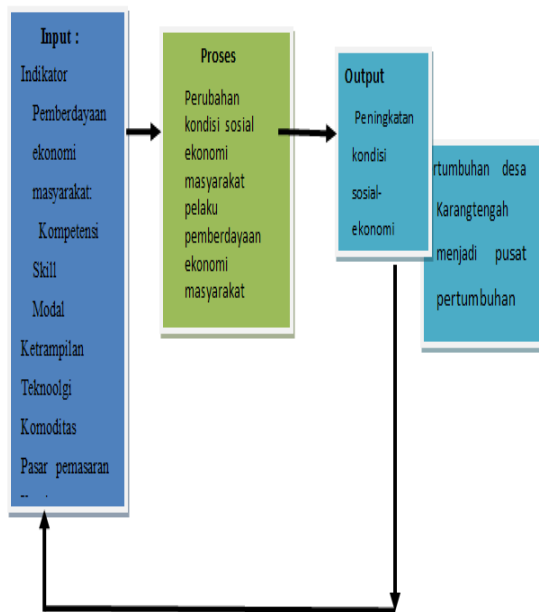
1. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan,
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang yang proposional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan sebagai upaya dalam rangka membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Aplikasi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, disatu sisi masyarakat tidak mampu atau berdaya tanpa adanya bantuan pakar atau ahli dalam melaksanakan penyusunan, sampai pelaksanaan program yang telah dimusyawarahkan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam analisis PRA bagi daerah pedesaan ataupun perkotaan dilaksanakan dengan analisis GMP (Gawat, Mendesak, dan penyebarannya), dimana analisis GMP ini memiliki beberapa tahapan sebagai berikut (Agus Djoko Santosa , 1996)

1. Identifikasi permasalahan dari kelompok sasaran (masyarakat)
2. Uji Prioritas masalah diurutkan sesuai skala prioritas
3. Uji pemerataan antar masalah terpilih
4. Hubungan masalah relevan dengan potensi desa/ masyarakat (dana, SDM, dan SDA)
5. Rencana Tindak lanjut, berisikan rancangan dan penyusunan program sesuai kebutuhan kelompok sasaran (masyarakat)

Tahapan ini akan berkaitan dengan ruang, waktu, aliran, dan keputusan. Ruang menjawab apa, dan dimana, Waktu menjawab kapan, Aliran menjawab bagaimana, dan keputusan menjawab mengapa program diusulkan dan siapa yang akan memperoleh benefit (manfaat). Kelengkapan dari desain pelatihan , maka perlu dilaksanakan evaluasi teknis, maupun administratif atas kegiatan pemberdayaan dalam tataran implementasi. Dengan demikian secara sistematis kerangka berpikir untuk kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat disajikan sebagai berikut



Gambar.1.1.
Kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam mendukung akselerasi pertumbuhan desa Karangtengah di Provinsi DIY **Lokasi.**

Lokasi penelitian secara purposive dipilih desa Karangtengah, wilayah kecamatan Imogri , kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan mendasar dipilihnya lokasi desa Karangtengah, antara lain :

1. Desa Karangtengah merupakan wilayah pembangunan kawasan Transmigrasi, yang dipindahkan dari desa sekitarnya selanjutnya disebut dengan desa transmigrasi ring I
2. Desa Karangtengah memiliki wilayah perbukitan mulai tahun 1995. dikembangkan untuk reboisasi tanaman jambu mete, yang menjadi salah satu komoditas masyarakat .
3. Desa Karangtengah mempunyai akses internal antar desa yang sangat baik, dengan kondisi jalan aspal, dan sebagian blok beton, di wilayah kecamatan imogiri, dan memiliki jarang terpendek untuk mencapai pusat kecamatan Imogiri.
4. Desa Karangtengah mempunyai masyarakat yang siap menerima pemberdayaan dalam upaya

meningkatkan desa Karangtengah menjadi desa berkembang, multiplier effectnya menjadi pusat pertumbuhan pedesaan di wilayah kecamatan Imogiri.

Variabel dan Data dalam kajian

Variabel serta data yang dibutuhkan dalam perencanaan pengembangan kawasan pedesaan di karangtengah , meliputi :

Tabel.2. Variabel serta Data dibutuhkan

No	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	Fisik	Tanah	1.1. Kesuburan
			1.2. Jenis tanah
			1.3. Klasifikasi tanah
			1.4. Kesesuaian lahan
			1.5 Kemampuan lahan
			1.6 Daya dukung lahan
		Air	2.1 Iklim wilayah mikro
			2.2. DAS dan Sub DAS
			2.3. Air bersih sumber
			2.4 Sumber air pertanian
			2.5. Konservasi air
		Vegetasi	3.1. Status Hutan
			3.2 Tegakan kayu hutan
			3.3. Tegakan kayu dominan
			3.4. Vegetasi unggulan
			3.5. Vegetasi sampingan
			3.6. Land cover
			3.7 Land capability
			3.8. Land Utilitation
Batuan	3.9. Land Use		
	3.10. Flora dan fauna		
2	Sosek	Pertanian	4.1. Geologi batuan dasar
			4.2. Geohidrologi
			4.3 Batuan induk
		Sapras	5.1. jalan desa
			5.2.Jalan kecamatan
			5.3.Jalan kebun
			Luas lahan pertanian
		Penduduk	Pola tanam
			Komoditas unggulan rencana
			Ketersediaan tenaga kerja
Kemampuan teknologi			
Analisis Kesesuaian lahan			
Teknologi pengolahan lahan			
Penduduk	jumlah penduduk		
	jumlah petani		
	jumlah pedagang		
			jumlah pekerja jasa.

		Kesehatan	Posyandu
			Posyanmas
			Pustu
			Puskesmas
			Pelayanan ibu dan anak
		Peternakan	Jumlah ternak besar
			Jumlah ternak kecil
			Unggas
		Biocyclo farming	Lokasi rencana BCF
			sarana dasar BCF
			Recana pendukung BCF
			Proyeksi kemanfaatan

Analisis

Analisis dalam kajian dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan PRA dengan analisis Triangulasi. Tujuan PRA yang paling utama adalah untuk menghasilkan rancangan program yang gayut dengan aspirasi serta kehendak dan kebutuhan masyarakat. Menurut ahli lain yang membahas mengenai PRA menyatakan bahwa dibanding dengan pendekatan lain PRA memiliki karakteristik menonjol. Dimana karakteristik tersebut adalah :

1. Mengaplikasikan teknik triangulasi, dimana dengan teknik ini memungkinkan terjadi peningkatan kualitas informasi yang diperoleh dan berfungsi lanjut sebagai *cross chek* informasi, yang diperoleh selama pelaksanaan PRA.
2. Dalam Altitifas PRA dapat dilakukan lebih dari satu kali tergantung hasil yang diperoleh di tingkat lapangan.
3. Pendekatan antar disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan

penelitian dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

4. Apresiasi terhadap pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan mendorong sekaligus membantu dalam merancang program.

Dalam teknik PRA, bukan saja hasil akhir dipergunakan didalam penyusunan rencana program, akan tetapi prosedur untuk menggali informasi. Metode PRA merupakan alat yang cukup baik. Pada dasarnya PRA, merupakan metode yang memiliki karakter sendiri, dalam pengertian alat yyang mampu menggali informasi yang bersifat umum ataupun khusus., tergantung kebutuhan serta tujuan penelitian. Biasanya kegiatan penggalian informasi dengan metode ini, merupakan piramida terbalik, dimulai penggalian informasi bersifat umum sampai informasi mendalam dan terfokus.

Secara teknis prosedur pelaksanaan PRA tidak pernah ada, mengingat sebagai suatu metode sampai saat ini PRA masih berkembang. Bahkan kadangkala perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan lapangan. Walaupun tidak ada prosedur baku, dalam pelaksanaan, akan tetapi secara umum dapat dirumuskan urutan ataupun tahapan sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi serta perijinan.
2. Penelusuran data sekunder dan data lapangan
3. Sintesis dan analisis
4. Identifikasi masalah dan peluang pemecahan masalah.
5. Menentukan peringkat dan peluang pemecahan masalah.

Rincian ringkas prosedur PRA disajikan pada tabel.3.1 berikut .

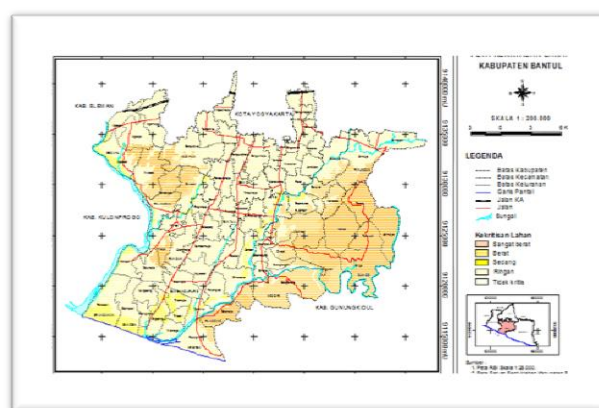
No	Aktifitas	Data diambil	Sasaran
1	Perijinan dan pemilihan lokasi	1. Ijin Prinsip	Pejabat setempat
		2. Pemilihan lokasi	Lokasi terpilih berdasar tujuan
2	Penelusuran Data sekunder dan data lapangan	1. Data sekunder	Informasi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya
		2. Data primer	Informasi spasial, waktu, ekonomi, budaya, teknis, dll
3	Analisis dan Sintesis		Sintesis dan analisis dari permasalahan dan menilai antara peluang dan kendala pelaksanaan program, disusun oleh masyarakat dipandu penilai, peneliti, pendamping
4	Identifikasi masalah dan pemecahan masalah		Analisis program, pemecahan masalah, peluang dan pelaksanaan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjabarkan ke 3 karakter tersebut, beberapa parameter yang akan diukur serta dihitung antara lain : 1).parameter fisik , meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya air, iklim, pola tanam, tanah, batuan, topografi, dan vegetasi, 2). parameter sosial, meliputi penduduk, kesehatan, pendidikan, agama;kelembagaan, 3) parameter ekonomi, meliputi sarana prasarana jalan, pasar,kios, dan kelembagaan ekonomi, dan 4) parameter budaya, meliputi adat-istiadat, norma atau tata nilai, dan kesanggupan untuk menerima transmigran. Seluruh informasi tersebut, disusun menjadi peta tematik dengan uraian dalam bentuk analisis diskriptif dari setiap parameter, dan diakhiri dengan perencanaan detil bagi kebutuhan suatu calon kawasan pemukiman.

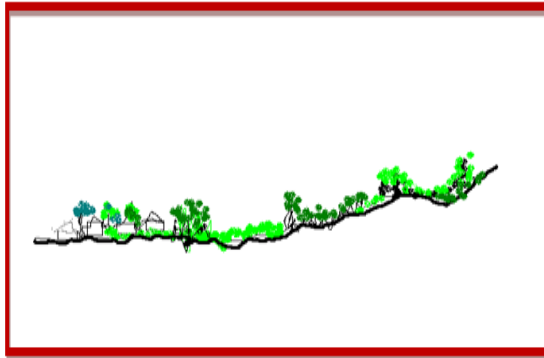
Setiap parameter yang diperoleh di lapangan disusun dalam peta, khususnya adalah parameter fisik. Maksud seluruh informasi fisik dijabarkan dalam peta, agar supaya para user maupun stakeholder, akan memahami secara benar seluruh informasi, yang terurai dalam bentuk batas, luas serta potensinya. Pengertian

dari peta sebagaimana disampaikan oleh Erwin Raiss dalam Basuki Sudiharjo(1979/1980), peta merupakan gambaran konvensional daripada permukaan bumi seperti kenampakannya kalau dilihat tegak lurus dari atas dan diberi tulisan dan keterangan bagi kepentingan pengenalan. Definisi Erwin ini pada saat sekarang tidak dapat memenuhi semua macam peta, terutama sebagian besar daripada peta-peta tematik dan peta-peta yang menyangkut tubuh-tubuh atau benda-benda ruang angkasa. Selanjutnya definisi peta menurut F.J Monkhouse dan H.R Wilkinson (1973), peta secara esensiil dapat dianggap sebagai suatu perakitan terpadu atau suatu sintesa daripada empat kelompok informasi yaitu : titik, garis,wilayah, dan nama, yang dikemukakan dalam istilah-istilah : liputan, ciri, pola, bentuk,ukuran,ketebalan,simbul dan lain-lain. peta menurut isinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu peta umum,peta khusus atau ber tema, dan chart. Peta tematik atau peta khusus merupakan peta yang menggambarkan informasi bersifat khusus, misalnya peta penduduk, dalam peta tematik penduduk dapat digambarkan tingkat kepadatan, distribusi, komposisi usia dan sebagainya.



Transek dan PRA

Pada awal penyusunan program pembangunan masyarakat dilaksanakan pengenalan masalah. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan pertanian maka pendekatan agroekosistem menjadi dasar untuk menyusun unit analisis. Dari keberadaan kawasan dusun Karangtengah disusun agroekosistem sebagaimana gambar. 1



Gambar. 2. Transek gambaran keadaan Karangtengah

Landuse	Pemukiman	Tegalan/sawah	Sawah	Kebun/ladang	ladang
Vegetasi	Rumah dan pekarangan	Padi sawah/palawija	Padi ladang	Empon-empon Mahoni Nangka Sirsak Jambu mete	Empon-empon Mahoni Nangka Sirsak Jambu mete
Status lahan	Sultan ground	Sultan ground	Sultan ground	Sultan ground	Sultan ground
Jenis tanah	Latosol/litosol	Latosol/grumosol	Regusol/grumosol	Latosol/litosol	Latosol/litosol
Kesuburan	Rendah	Rendah	Sedang-rendah	Rendah	rendah
Masalah	1. Air tanah 2. Kesuburan tanah 3. Hama 4. Produksi rendah 5. Gizi keluarga rendah 6. Pendidikan rendah 7. Kesehatan rendah	Kesuburan Hama Produksi rendah Hama teknologi	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi

Informasi sumberdaya disini berupa sumberdaya yang dapat dimanfaatkan petani atau masyarakat, dalam mengelola lahan yang dimiliki. Dengan menggunakan PRA diharapkan dapat menggali potensi tenaga kerja, modal, penghasilan, status kepemilikan lahan, masalah serta kendala lain yang dihadapi. Hasil diperoleh menunjukkan prioritas yang perlu ditangani, kemudian disusun matriks hubungan antara permasalahan dengan skore (menggunakan skala rating) sebagaimana disajikan pada tabel.4 Tabel.6. . Uji Prioritas permasalahan di lokasi kajian

No	Masalah	skore			Jumlah
		Gawat	Mendesak	Distribusi	
	Kesuburan tanah rendah				
	Produksi rendah				10
	Erosi dan degradasi lahan				10
	Diversifikasi tanaman				

Sumber : FGD, 2018

Keterangan :

Angka 5 = berarti gawat

Angka 3 = berarti mendesak

Angka 2 = berarti distribusi merata

Matriks menunjukkan masalah utama yang memperoleh prioritas ditangani adalah Produksi rendah, sebagai akibat oleh kesuburan tanah yang rendah dan merata tersebar di seluruh kawasan, diikuti oleh kerusakan lahan pada daerah perbukitan karena erosi ataupun degradasi lahan, yang hampir merata di seluruh kawasan bagian selatan, kesuburan tanah merata di seluruh kawasan dan diversifikasi tanaman yang dapat diselenggarakan merata baik di lahan pekarangan maupun persawahan. Intensitas hubungan antar masalah, kemudian disajikan dalam format tabel.5 sebagai berikut.

Tabel.5. Intensitas hubungan antar masalah

Masalah	Kesuburan tanah	Produksi rendah	Erosi dan degradasi lahan	Diversifikasi tanaman
Kesuburan tanah	+	++	+	+
Produksi rendah	++	+	+	-
Erosi dan degradasi lahan	+	+	+	
Diversifikasi tanaman	+	++	+	

Keterangan:

+ = significant antar masalah

++ = sangat significant antar masalah

- = tidak significant antar masalah

- - = sangat tidak significant antar masalah

0 = tidak ada hubungan antar masalah

Dari tabel.5. nampak bahwa masalah utama dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Karang tengah adalah :

1. Peringkat 1 = produksi rendah

- 2. Peringkat 2 rendah = kesuburan tanah
- 3. Peringkat 3 lahan = Erosi dan degradasi
- 4. Peringkat 4 = Diversifikasi tanaman

Langkah penetapan prioritas selanjutnya diturunkan dengan menyusun topic dan sub topik yang direncanakan menjadi usulan masalah yang perlu ditindak lanjuti , sebagaimana disajikan pada tabel.6.

Tabel.6. Topik dan Sub Topik usulan program

Aspek	TOPIK	SUB TOPIK
Sumberdaya lahan	1. Produksi Rendah	1.1. Kesuburan tanah rendah 1.2. Erosi dan degradasi lahan 1.3. Teknologi konvensional
	2. Kesuburan tanah rendah	2.1. Kurang unsur hara tanah 2.2. Pupuk dan pestisida organik
	3. Erosi dan degradasi	3.1. Konservasi tanah dan air 3.2. Rehabilitasi lahan
	4. Diversifikasi	4.1. Multicropping 4.2. Integrated farming 4.3. Biocyclofarming 4.3. Peternakan
Sumberdaya manusia	1. Pendidikan	1.1. PAUD 1.2. APS dan APK 1.3. Kejar Paket
	2. Kesehatan	2.1. Kader kesehatan 2.2. Kualitas air 2.3. Pengelolaan dan pengolahan limbah 2.4. Kesehatan lingkungan 2.5. Kesehatan Masyarakat

Penyusunan RPKD (Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan)

Secara Teknis penyusunan RPKD, merupakan aktifitas, yang menggambarkan potensi dasar fisik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu kawasan yang dipersiapkan menjadi lokasi pedesaan. Dilanjutkan dengan menyusun proyeksi kemungkinan pengembangan kawasan ke depan, dengan ditunjang dengan adanya komoditas andalan . Hasil identifikasi potensi kemudian dimanfaatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan , dimana secara rinci dan sistematis disusun sebagaimana disajikan pada tabel.8

Tabel.8. Rencana Pembangunan kawasan Karangtengah.

No	Dimensi	Indikator	sub indikator
1	RPKD	tata ruang	1. Penilaian aksesibilitas
			2. Penilaian fisik lahan
			3. penilaian status lahan
			4. Penilaian ketersediaan air
			5. Penilaian risiko banjir
			6. daya dukung lahan
2	Rencana jalan	Rencana teknis	2.1. Lay out control
			2.2. Desain geometrik
			2.3. Konstruksi
3	Pembukaan lahan	LC	3.1. Batas LC
			3.2. Teknis LC
			3.3. Persyaratan Teknis
4	enyiapan Bangunan	uild up	4.1. Jenis dan jumlah bangunan
			4.2. Tipologi bangunan pertanian
			4.3. Tipologi sarana BCF

Rencana tindak lanjut yang merupakan rincian kebutuhan masyarakat di dusun Karangtengah, Imogiri disajikan dalam bentuk Tabel.9. sebagai berikut .

Tabel.9. Usulan Pembangunan pusat pertumbuhan Desa Karangtengah, Imogiri

No usulan program	Apa yang diusulkan	Mengapa diusulkan	Dimana dilaksanakan	Kapan dilaksanakan	Siapa pelaksana	Berpartisipasi untuk siapa	Bagaimana dilaksanakan
Peningkatan Kompetensi petani	Pelatihan: 1. Pembuatan pupuk organik 2. Pembuatan pestisida organik 3. Konservasi sumberdaya lahan dan air 4. Pembuatan tees 5. Pembuatan chekidan 6. Rehabilitasi lahan	Untuk usaha meningkatkan kompetensi serta pendapatan petani	Dusun Karangtengah	2018 sampai 2022	Din. Pertanian Din. Peternakan Balai Besar Ketansngriasan Dinas tenaga	Petani/ masyarakat	Dana APBD anggaran 2018-2022

7.	Penggunaan Alasbata				kerja
8.	Pengolahan hasil				transmigrasi
9.	Penanaman multicropping				Din.Indag
10.	Integrated Farming				Dinas
11.	Bioylo Farming				Pendidikan
12.	Peternakan				Dinas
13.	Perikanan				Kesehatan
14.	Intensifikasi lahan				
15.	Pemberdayaan lahan pelarangan				
16.	Pemberantasan hama terpadu				
17.	PAUD				
18.	APS dan APK				
19.	kejar Paket				
20.	Kader kesehatan				
21.	Kualitas air				
22.	Pengelolaan dan pengolahan limbah				
23.	Kesehatan lingkungan				
24.	Kesehatan Masyarakat				
25.	Ekonomi rumah tangga				
26.	Kewirausahaan				
27.	pasar dan pemasaran				
28.	Pengolahan hasil				
29.	kelembagaan				
30.	pendampingan				
31.	industri rumah tangga				
32.	Jasa pertukangan dan montir				

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Pembangunan masyarakat pada era Otonomi daerah , mengandalkan kekuatan daerah yang diindikasikan dengan sumberdaya tersedia meliputi sumberdaya alam, buatan dan manusia.
2. Model dikenali ada tiga yaitu Pemberdayaan lokal , perencanaan sosial, dan aksi sosial., dalam implementasi lapangan khususnya Karangtengah dimana lokasi mewakili wilayah perbukitan, dan wilayah dataran , merupakan mixed antara pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan social dipergunakan dalam menjaring *Needs Assesment* masyarakat.
3. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam penyusunan program pembangunan desa Karangtengah menjadi desa berkembang dan memungkinkan menjadi pusat pertumbuhan di kecamatan Imogiri., berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga dalam implementasinya akan berdaya guna dan tepat guna.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kelompok kerja pemberdayaan Masyarakat di desa karang Tengah Imogiri Yogyakarta
2. Pemdes Karang tengah Imogiri , Kecamatan Imogiri Yogyakarta
3. Pemerintahan Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta
4. Anggota Tim Abdimas.

DAFTAR REFERENSI

Agus djoko Santosa, 1996. Analisis Kebutuhan Pelatihan suatu Pendekatan partisipatif, Puslatrans, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Jakarta

Agus Djoko Santosa, 2000, Pemberdayaan kawasan Transmigrasi ring I Karangtengah imogiri yogyakarta, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY, Yogyakarta

Agus Djoko Santosa, 2003. Pembangunan ekonomi rakyat dengan SLPHT , dinas Perkebunan Propinsi DIY, Yogyakarta

Craig G dan M. Mayo,1995, Community Empwerment a reader in Participation and Development , London, Zed Books

Hikmat,H, 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung

*Mc Ardle , 1989,*Community Development Tools and trade Community Quartely Journal, vol.16

Mikkelsen, B,2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya –upaya Pemberdayaan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

*Rappaport ,1987.*Term of Empowerment Toward a Theory for community Psychology, American Journal of Community Psychology, vol 15 No.2